



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

2023  
LKJIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

 @bpkad.bangkalan

 (031) 3098579

 Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH**  
**TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 22 Januari 2024

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN' at the top and 'BPKAD' at the bottom. The inner border contains 'BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH'. In the center, there is a signature and the name 'ABDUL AZIZ, S.Si' in bold, followed by 'Pembina Tingkat I'.

**ABDUL AZIZ, S.Si**  
Pembina Tingkat I

NIP. 197407292003121006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DARTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
A. Rencana Strategis .....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	43
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	14
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022 .....	15
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	26
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	28
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	30
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain .....	31
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	31
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	34
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	44
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut badan pengelolaan keuangan dan aset daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran

terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala Badan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :

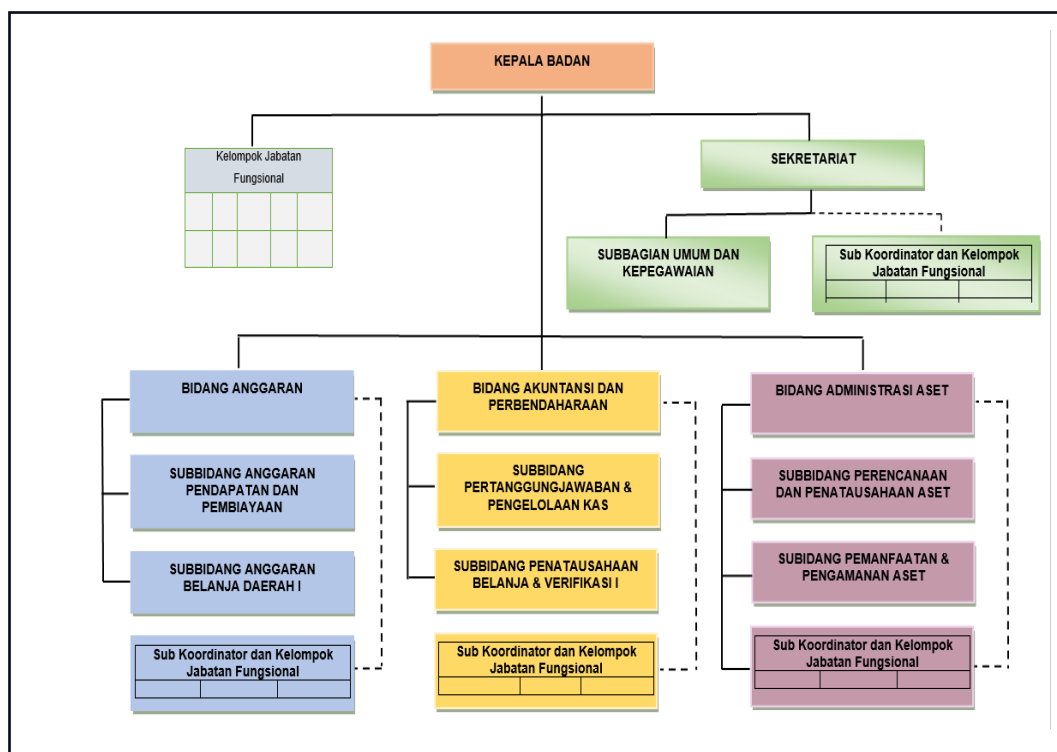
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Anggaran, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
  - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
  - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;

- 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kersip dan perpustakaan;



- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **2. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan**

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di

bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Administrasi Aset**

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penyusunan APBD
2. Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah  
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.  
Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan
4. Kurang tertibnya Administrasi pengelolaan barang milik daerah  
Kurangnya kedisiplinan dari petugas pengelola barang milik daerah mengakibatkan terganggunya proses, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja berikutnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pembinaan yang terus menerus bagi petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menerima beban kerja yang diemban sehingga diperlukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja agar kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada PD dan masyarakat.

3. Disiplin petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

Perlunya peningkatan kedisiplinan pengawasan pada pengelola keuangan dan aset daerah dalam pemanfaatan, pencermatan dan keakuratan data untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja berikutnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang terus menerus bagi petugas pengelola keuangan dan aset daerah.

4. Belum optimalnya pengelolaan aset Daerah

Perlunya peningkatan dan optimalisasi kinerja dalam Pengelolaan aset Daerah, seperti Penghapusan Aset Daerah yang sudah tidak layak pakai.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BADAN Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi;
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkandaya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

**“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”**

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	0	100	100	100	100	100

*Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah periode 2018-2023*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan		Opini BPK terhadap LKPD		Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Tidak Wajar/ Tidak Menyatakan Pendapat	LKPD
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	Prosentase	Menghitung perangkat daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan mulai dari proses penganggaran sampai penyampaian laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	(Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan / Jumlah OPD) x 100%	Laporan Kinerja Pengelolaa n Keuangan Daerah
		1.2	Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase	Menghitung perangkat daerah yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai dengan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	(Jumlah OPD tertib administrasi pengelolaan Barang Miik Daerah / Jumlah OPD ) x 100%	Laporan Kinerja Pengelolaa n Barang Milik Daerah

	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1.3	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Indeks	Menghitung kepuasan internal pada pelayanan kesekretariatan	Nilai SKM	Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan
--	--	-----	--	--------	---	-----------	---

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**  
**Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	Prosentase	100%
		1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Prosentase	100%
		1.2 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	Indeks	100

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2023

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 pada tanggal 09 Oktober tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**  
**Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100

*Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**  
**Tahun 2023**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Kali
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	1 Kali
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Kali
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	1Kali
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen

	Penjabaran APBD		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	2 Dokumen

	dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen

	Sub Kegiatan		
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dokumen
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dokumen
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	4 Laporan

	Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang tersusun</b>	<b>100%</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14 Laporan
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>
<b>5.02.03.2.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>



5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket

5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	22 Unit

	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan</b>	<b>Opini BPK terhadap LKPD</b>	<b>WTP</b>				<b>LKPD</b>
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	92,44	92,44%	Tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>97,48%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi target dari tujuan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dapat dipenuhi sampai

disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini karena opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terbit pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Adapun rata-rata capaian dari 3 indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah 97,48% atau sangat tinggi. Adapun tingkat capaian dari masing-masing 3 indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 100% atau sangat tinggi, serta capaian pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan adalah 92,44% atau tinggi, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
  - a. Sebanyak 52 OPD dari total seluruh OPD di Bangkalan yang berjumlah 52 OPD telah melaksanakan penyusunan rencana anggaran sampai penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan, artinya seluruh OPD telah memenuhi tata kelola keuangan sesuai ketentuan sehingga tingkat capaian pada indikator kinerja ini adalah 100% atau sangat tinggi.
  - b. Sebanyak 52 telah tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dari total seluruh OPD di Bangkalan yang berjumlah 52 OPD, artinya seluruh OPD telah memenuhi proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu sehingga tingkat capaian yang diperoleh adalah 100% atau sangat tinggi.

Faktor pendukung tingginya capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan setiap minggu, koordinasi yang intens dengan masing-masing SKPD dan koordinasi dengan pihak eksternal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

- 2) Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan  
Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Internal Kesekretariatan dari bidang-bidang diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 92,44 atau tinggi. Capaian ini didukung karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah seperti pencairan gaji dan tunjangan yang tepat waktu, kemudahan dalam pengajuan pencairan dana, pengadaan alat tulis kantor, peralatan serta kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan</b>	<b>Opini BPK terhadap LKPD</b>	WTP	WTP	WTP	WTP		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	95,08%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan		100	90,55	100	92,44	92,44%

Berdasarkan tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
  - a. OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan pada tahun 2023 mencapai target sebesar 100%. Capaian tersebut sama apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang menunjukkan capaian 100%, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jadwal Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan sampai Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD yang diderikan oleh BPKAD;
  - b. OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2023 mencapai target sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan angka yang sama apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memenuhi capaian target sebesar 100%.

2) Pada sasaran ke-2 Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan pada tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 92,44%. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun capaian Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan pada tahun 2022 sebesar 90,55%. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya kotak saran dan pengaduan secara online guna meningkatkan kinerja pelayanan kesekretariatan sehingga kebutuhan dan kepuasan internal atas pelayanan kesekretariatan dapat terpenuhi.

**Faktor pendorong pencapaian sasaran :**

- a. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) dan aplikasi lainnya sehingga mampu mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan pengelolaan BMD yang tertib administrasi
- b. Adanya pembinaan secara intens kepada seluruh OPD dalam rangka melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
- c. Komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada OPD
- d. Koordinasi yang tinggi dari setiap pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

**Faktor penghambat pencapaian sasaran :**

- a. Belum sempurnanya aplikasi yang digunakan sehingga sering kali terjadi *error system* yang menghambat kegiatan operasional instansi
- b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	92.44	100	92.44%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada tahun 2023 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2023) adalah 97,48%. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat kemajuan masing-masing indikator yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD setiap tahun konsisten dalam mencapai target akhir sasaran Renstra 2018-2023. Adapun sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan pada tahun 2023 memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 92,44%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap LKPD			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%		100%
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	92.44		92.44%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi target dari sasaran Renstra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se-Jawa Timur sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada sasaran Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 telah selaras dengan standar nasional yaitu sasaran pada Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kualitas	Opini BPK terhadap LKPD	WTP			Berhasil mencapai	

	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan					target	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Berhasil mencapai target	
		Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	Berhasil mencapai target	
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	92.44	92.44%	Berhasil mencapai target	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan indikator persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan indikator persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah masing-masing **berhasil mencapai target** sebesar 100%. Adapun sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan juga **berhasil mencapai target** dengan capaian 92,44%.

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai realisasi kinerja yaitu :

- 1) Tujuan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD
  - Koordinasi yang intens dengan pihak terkait baik eksternal dan juga internal serta dengan seluruh OPD
  - Aktif dalam mengikuti pembinaan dan memberikan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah
  - Adanya kerjasama yang terarah, terukur dan inovatif sehingga menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan program

- Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - Koordinasi internal pejabat struktural yang dilakukan setiap minggu dalam memonitoring dan evaluasi permasalahan atau hal-hal yang menghambat dan menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan
- 2) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan indikator:
- a. Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan
    - Koordinasi yang intens dengan OPD terkait pengelolaan keuangan, khususnya dalam pemenuhan laporan atau dokumen wajib yang harus dikumpulkan oleh masing-masing SKPD
    - Memberikan surat teguran kepada OPD yang progresnya lambat dalam penyusunan atau pemenuhan tata kelola keuangan
    - Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan
  - b. Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
    - Koordinasi yang intens dengan masing-masing SKPD mengenai barang milik daerah yang bermasalah, belum lengkap persyaratannya dan lainnya
    - Memberikan surat teguran pada SKPD yang belum menyampaikan laporan Barang Milik Daerah sesuai batasan waktu yang diberikan
    - Aktif dan ikut serta dalam melakukan pengecekan fisik barang milik daerah
    - Konsistensi dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 3) Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan
- Konsistensi dalam pelaksanaan setiap kegiatan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan
  - Koordinasi internal yang dilakukan setiap bulan di setiap bidang untuk menjaga konsistensi dalam hal penyampaian laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mencapai realisasi anggaran dan kinerja yang telah direncanakan
  - Menerima setiap kritik, saran dan masukan dalam memberikan pelayanan pada setiap bidang untuk kemudian ditindaklanjuti

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/ sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	100	

					Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100	
				<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	



				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100	
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang	Jumlah Dokumen Hasil	100	

			Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	
			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	
			Konsolidasi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	100	

				SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	
				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten	100	

					/Kota		
		Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100	
	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	92.44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
				Koordinasi dan	Jumlah	100	

				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani</b>	<b>97</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	0	

					dan Pelatihan		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100	

				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	



				Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitas i		
--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja dari semua program adalah 100%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan yang telah tercapai sebesar 100%, capaian tersebut menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun penganggaran sampai penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan.

**2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mencapai target sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

**3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang telah mencapai target sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>452.262.153.771</b>	<b>450.807.455.053</b>	<b>99.68</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.794.600.000	1.680.736.000	93.66
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	249.825.625	235.781.351	94.38
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	261.148.450	226.688.412	86.8
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	449.956.579.696	448.664.249.290	99.71
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>721.899.136</b>	<b>686.265.850</b>	<b>95.06</b>
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	721.899.136	686.265.850	95.06
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>34.679.437.975</b>	<b>33.062.982.947</b>	<b>95.34</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.852.000	70.020.650	92.31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.909.980.980	28.155.693.442	94.13
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.881.800	24.951.400	96.41
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.005.000	39.964.995	79.92
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.476.750	515.689.939	84.2
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.507.830	214.877.629	80.63

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.135.260.000	3.031.421.008	96.69
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.473.615	474.453.884	82.99

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.663.490.882,-. Adapun realisasi anggaran BPKAD pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 484.020.793.850,- atau 99,25% dari pagu anggaran yang ditetapkan dan terdapat sisa pagu sebesar Rp. 3.642.697.032,-. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 27 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 452.262.153.771,- dan realisasi sebesar 450.807.455.053,- atau memperoleh capaian sebesar 99,68% dari pagu yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.454.698.718,-

### 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2023 terdiri dari 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp. 721.899.136,- dan realisasi sebesar Rp. 686.265.850,- atau 95,06% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 35.633.286,-

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.679.437.975,- dan realisasi sebesar Rp. 32.527.072.947,- atau capaian yang diperoleh sebesar 93,79% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp. 2.152.365.028,-

## C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**

### Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan Kualitas	WTP			487.663.490.882	484.020.793.850	99,25	

	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan							
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	100%	100%	100%	452.984.052.907	451.493.720.903	99,67	0,33
	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	452.262.153.771	450.807.455.053	99,68	0,32
	Prosentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	721.899.136	686.265.850	95,06	4,94
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100	92,44	92,44%	34.679.437.975	32.527.072.947	93,79	-1,35

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 99,25% dengan capaian kinerja yang belum dapat dipenuhi karena jadwal penerbitan opini BPK terhadap LKPD. Adapun tingkat efisiensi dari masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,67% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,33% dengan rincian indikator sebagai berikut;

4) Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian realisasi anggaran pada indikator sasaran ini adalah 99,68% dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,32%

- 5) Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian realisasi anggaran pada indikator sasaran ini adalah 95,06% dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,94%
2. Terpenuhiya Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan:
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 93,79% dengan capaian kinerja sebesar 92,44% sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -1,35% atau tidak ada efisiensi sebab capaian kinerja belum mencapai 100% karena tingginya target yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan indikator kinerja dan target capaian yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - Indikator kinerja persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan memiliki target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga nilai capaian sebesar 100%;
  - Indikator kinerja persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah masing-masing menentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%

- Sasaran ke-2 Terpenuhi pelayanannya pelayanan kesekretariatan
  - Indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan menetapkan target kinerja sebesar 100 dengan realisasi kinerja sebesar 90,55 sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 90,55%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 487.663.490.882,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 484.020.793.850,- dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2023 capaian serapan anggaran sebesar 99,25%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangunkinerja instansi.

Bangkalan, 22 Januari 2024

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN



**ABDUL AZIZ, S.Si**

Pembina Tk I

NIP. 19740729 200312 1 006

# **LAMPIRAN**